

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang mampu memberikan kemudahan dalam akses. Lembaga/Badan Hukum yang ada di dalam masyarakat juga turut memiliki fungsi dan tujuan oprasional praktis, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan Nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan melalui penetapan kebijaksanaan pemerintah akhir-akhir ini.

Semenjak Tahun 1988 melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1988 pemerintah membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah "Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus di dirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan". Adapun bidang usaha lembaga pembiayaan :

1. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*)
2. Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*)
3. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*)
4. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*)
5. Kegiatan Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*)
6. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*)

Menurut Sunaryo di dalam bukunya hukum lembaga pembiayaan yaitu "Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat".¹ Secara ketentuan hukum Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 1

9 Tahun 2009 ini yang dimaksud Lembaga Pembiayaan adalah "Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal". Adapun di dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 ini yang dimaksud "Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit". Menurut Zaeni Asyadie²

"Jadi dalam pelaksanaan suatu pembiayaan haruslah mempunyai legalitas baik berbentuk badan usaha maupun badan hukum. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat".

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Consumer Finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*Consumer Credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. "Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*Financing Company*). Sedangkan kredit konsumen (*Consumer Credit*) biayanya diberikan oleh bank".³

Terfokus pada Lembaga pembiayaan konsumen, yang menjadi dasar pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu asas kebebasan

² Zaeni Asyadie, 2005, *Hukum Bisnis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hal 83

³ *Op.Cit.* Hal 95

berkontrak dan Perundang-Undangan di bidang hukum perdata. Dalam asas kebebasan berkontrak hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana dan konsumen sebagai pihak pengguna dana.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. "Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*In Good Faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*Unilateral Unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen".⁴

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah

⁴ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 256

ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

Dasar yuridis yang dapat dijadikan sumber adalah Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1313 disebutkan perjanjian merupakan “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak menjelaskan suatu bentuk perikatan. Perikatan sendiri diartikan dalam Pasal 1233 KUHPerdata yaitu “tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

Perlu adanya pemahaman terlebih dahulu terkait asas kebebasan berkontrak, sebelum beranjak kepada proses pembiayaan secara lebih mendalam. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁵

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Kesimpulannya bahwa perjanjian dan perikatan merupakan suatu hal yang berbeda. Dimana perjanjian timbul karena adanya satu orang atau lebih

⁵ Salim H.S.,S.H.,M.S. 2011, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 9

yang mengikatkan diri, sedangkan perikatan timbul karena didahului suatu perjanjian atau karena peraturan Perundang-Undangan yang mengatur. Pembiayaan konsumen merupakan perjanjian tidak bernama dari jenis perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang.

Empirisnya yang terjadi di dalam lembaga pembiayaan konsumen khususnya di PT. Oto Multiartha Malang. Contohnya yaitu kredit macet, pengembalian kendaraan oleh debitur karena tidak bisa memenuhi angsuran yang sebagaimana menjadi tanggung jawabnya, kemudian kendaraan tersebut ditarik oleh pihak kreditur. Akan tetapi sebelum kendaraan itu ditarik, pihak debitur mengganti beberapa bagian kendaraan yang kendaraan tersebut sudah menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen.

Meskipun hal tersebut sudah tercantum pada klausula perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Oto Multiartha Malang yang sudah disetujui kedua belah pihak antara debitur dan kreditur. Jelas ini bentuk wanprestasi atau cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian ini. Adapun pengertian tentang wanprestasi adalah sebagai berikut:⁶

keadaan dimana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat daripada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Jika tidak ditentukan lain daripada isi kontrak tersebut, maka seorang/debitur harus segera memenuhi prestasi atau harus segera *Menpresteerd*.

⁶ Komariah. 2010. *Hukum Perdata*. Malang. Umm Press. Hal 149.

Kasus lainnya berkaitan dengan keadaan yang merugikan dalam proses pembiayaan konsumen yaitu:⁷

PT Oto Multiartha, melaporkan konsumennya ke polisi, atas kasus penggelapan satu unit mobil. Kasus penggelapan ini pada tanggal 15 Mei 2013 lalu z-a membeli satu unit mobil pick up Daihatsu Grand Max tahun 2013, secara kredit kepada perusahaan PT Oto Multiartha, namun setelah berjalan beberapa bulan, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, z-a kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada saudara m-l. Kasus tersebut diketahui setelah seorang debt collector dari pihak perusahaan, akan menarik mobil dari tangan z-a namun mobil telah berpindah ke tangan orang lain. Karena perbuatan a-z dan rekannya dianggap telah merugikan pihak perusahaan sebesar 78 juta rupiah, akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian agar bisa ditindak lanjuti.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang dan permasalahan yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh lagi dan menjadikan permasalahan tersebut di atas sebagai tugas akhir skripsi yang berjudul : **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MOBIL PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di PT OTO Multiartha Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Oto Multiartha Malang?

Aspek aspek yang akan diteliti meliputi:

⁷ __Pt.Oto Multiartha, *Melaporkan Konsumennya Ke Polisi, Atas Kasus Penggelapan Satu Unit Mobil*, <http://Rbtv.Co.Id/?P=1216>, Diakses Tgl 8 April 2016

- a) Para pihak perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Malang
 - b) Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Malang
 - c) Hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Malang
 - d) Klausula tentang wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Malang
2. Bagaimana upaya penyelesaian PT Oto Multiartha Malang apabila debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penulisan

Dari penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Oto Multiartha Malang dalam aspek-aspek yang akan diteliti meliputi:
 - a) Para pihak perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Malang
 - b) Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Malang
 - c) Hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Malang
 - d) Klausula tentang wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Malang

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian PT Oto Multiartha Malang apabila debitur wanprestasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kemajuan dibidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan teori berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta sebagai syarat akademis untuk mendapat gelar sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum.

- b. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran yang rasional dan profesional bagi PT. Oto Multiartha Malang dalam hal yang berkaitan dengan Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pemahaman hukum bagi masyarakat terutama tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

E. Metode Penelitian

Proses penyusunan skripsi, untuk memberikan kebenaran dari penulisan maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, karena metode penelitian sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode-metode tertentu. Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis yakni “melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum serta dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat”.⁸

Dengan metode pendekatan ini pendekatan masalah dilakukan dengan cara menggali keterangan dari berbagai pihak terkait PT Oto Multiartha Malang yaitu melalui wawancara dan dokumentasi terkait permasalahan yang akan diteliti, sebagai kajian dalam proses pembahasan dengan membandingkan teori dan kenyataan yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan melihat kenyataan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

⁸ Bambang Waluyo, 2007, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, Hal.6

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah di PT Oto Multiartha Malang. Penulis memilih lokasi penelitian di PT Oto Multiartha Malang karena berdasarkan hal-hal yang penulis ketahui tentang adanya atau debitur yang wanprestasi di PT Oto Multiartha Malang. Selain itu PT Oto Multiartha Malang adalah lembaga pembiayaan konsumen yang terkemuka di Indonesia yang tersebar di berbagai cabang kota, sehingga mampu memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah “jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/pertama”.⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan dokumen-dokumen di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data tidak langsung, berupa:

1. Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

⁹ Fakultas Hukum UMM, 2012, *Pedoman Penulisan Hukum*, halaman 18

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

2. Bahan hukum sekunder

- a) Tesis (Eko Puspito Ningrum, Semarang, 2005, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat).
- b) Jurnal Hukum (B.Rini Heryanti, S.H, M.H., Subaidah Ratna Juita, S.H, M.H., Ani Triwati, S.H, M.H., 2011, Semarang, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen)

3. Bahan hukum tersier

- a) Studi internet
- b) Majalah hukum

c. Data Tersier

Jenis data mengenai “pengertian baku bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari *Ensiklopedia*, *Kamus*, *Glossary* dan lain-lain”.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Responden dalam penelitian ini adalah:

1) PT Oto Multiartha Malang

Dari 10 pegawai PT Oto Multiartha Malang diambil 2 orang pegawai sebagai narasumber untuk menjawab permasalahan yang diteliti dengan teknik *Random Sampling* yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait permasalahan ini yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Konsumen, bagaimana upaya yang dilakukan PT Oto Multiartha Malang apabila ada debitur wanprestasi, Faktor apa yang menjadi pendukung atau penghambat dalam penyelesaian wanprestasi terhadap kredit kendaraan bermotor di PT Oto Multiartha Malang. 2 pegawai tersebut adalah Rudi Setiawan selaku *Marketing Head* PT. Oto Multiartha Malang dan Heru Candra Kartika selaku *Field Collection* PT. Oto Multiartha Malang.

2) Responden dari debitur yang wanprestasi

Responden dari debitur “jumlah 12 orang”.¹¹ Didapat dari keterangan

¹⁰ *Ibid*, Hal 18

pegawai PT Oto Multiartha Malang. Diambil 2 orang secara *Random Sampling* untuk menjawab permasalahan terkait latar belakang wanprestasi. Pengambilan data dalam teknik *Random Sampling* dilakukan dengan cara *Random Sampling*, pengambilan sample secara acak sederhana, ialah sebuah sample yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample dilakukan. Responden dari pihak debitur tersebut yaitu Adi Jatmiko dan Rizky Subegya.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi secara langsung didapat dari lokasi penelitian yaitu PT Oto Multiartha Malang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis terkait upaya penyelesaian wanprestasi kredit mobil pada perjanjian pembiayaan konsumen. Data dokumentasi yaitu berupa perjanjian yang mengikat kedua belah pihak antara PT Oto Multiartha Malang dengan debitur dan data nasabah wanprestasi tahun 2016.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif. Dimana¹²

“mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat melalui penggalan kasus-kasus konkrit dan keadaan hukum dilapangan yang terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran, makna dan cara

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rudi Setiawan selaku *Marketing Head*

¹² Burhan Ashofa, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 57

pandang yang baik masyarakat, ahli hukum ataupun dalam hal ini penulis sendiri terkait gejala yang menjadi objek penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan”.

Data yang diperoleh secara langsung di PT Oto Multiartha Malang yaitu data primer di diskripsikan secara jelas lalu menganalisanya dengan data-data sekunder. Sehingga nantinya mampu memberikan analisis terhadap permasalahan yang sudah di deskripsikan.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Oto Multiartha Finance yang akan dijadikan penulisan hukum.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penulis akan menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Oto Multiartha Finance berdasarkan pada teori dan kajian pustaka.

BAB IV PENUTUP

Bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan, serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan.

